

**PELIBATAN MASYARAKAT DALAM KEAMANAN MARITIM
(KAJIAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM MENDORONG
REFORMASI KEAMANAN DI PULAU TERLUAR SAMUDERA HINDIA)**

**INVOLVING OF COMMUNITIES IN MARITIME SECURITY
(STUDIES OF SOCIAL CHANGE OF COMMUNITIES IN TERM OF URGE SECURITY
REFORM IN INDIAN OCEAN REMOTE ISLANDS)**

Mukti Aprian¹

Universitas Pertahanan

(muktikmp@gmail.com)

Abstract -- *This paper provide an overview of the maritime security concept in Indonesia, which consists of four main research; social changes, security reform, world maritime nexus (Poros Maritim Dunia), and society participatory. The separation among those components is an illustration of gap between theoretical dan facts which difficult being ties in one Indonesian policy right now. With geopolitical change in Indonesia, making the policy looks realistic. Indonesia government which focusing on development of maritime and seaside communities has becoming an urge national interest for process of regional autonomy and security reform. Research with comprehensive studies using quantitative and qualitative methods that analyzing behaviors of government and actions of communities, also policy modeling using soft systems methodology has getting an ideal maritime security concept for Islands of Enggano and Siberut as two research locations.*

Keyword: *Social Changes, maritime security, world maritime nexus, society participatory*

Abstrak -- Paper ini merupakan gambaran akan konsep keamanan maritim di Indonesia, yang terfokus pada empat kajian; perubahan sosial, reformasi keamanan, konsep poros maritim dunia, dan pelibatan masyarakat kepulauan/perbatasan. Keterpisahan antara komponen-komponen tersebut merupakan suatu gambaran akan jarak teori dan praktis yang sulit dipersatukan dalam kebijakan Indonesia saat ini. Dengan adanya perubahan geopolitik di Indonesia, maka pemersatuan kebijakan tersebut terlihat masuk akal. Fokus pemerintah yang mengarah pada kemaritiman dan pembangunan masyarakat pinggiran merupakan kepentingan mendesak dalam proses otonomi daerah dan reformasi keamanan. Melalui kajian yang komprehensif dengan memanfaatkan kajian kuantitatif mengenai perilaku pemerintah dan tindakan sosial serta kajian kualitatif mengenai perubahan sosial serta dimodelkan dalam format *Soft Systems Methodology*, mendapatkan gambaran atas kebijakan keamanan maritim yang ideal dengan dua lokasi fokus penelitian yaitu pulau Enggano dan Pulau Siberut.

Kata Kunci: *Perubahan sosial, keamanan maritim, poros maritim dunia, pelibatan masyarakat*

¹ Mukti Aprian, S.Kel., M.Si (Han). Alumnus Mahasiswa Strata -2 Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2015-2016.

Pendahuluan

Presiden RI Joko Widodo pada KTT Asia Timur, di 9th East Asia Summit, Plenary Seasons, Nay Pyi Taw, Myanmar memperkenalkan paradigma poros maritim dunia sebagai jawaban atas perkembangan geopolitik dan potensi kekuatan bangsa. Poros Maritim Dunia (PMD) yang terdiri atas lima pilar yaitu Budaya Maritim, Pengelolaan Sumberdaya Alam, pembangunan Infrastruktur, Diplomasi, dan Keamanan sebagai bagian dari visi maritim kabinet kerja².

Keberadaan PMD akan menjadikan Indonesia pengimbang antara kebijakan beberapa negara kuat seperti halnya Tiongkok dengan program Maritime Silk Road, A.S dengan Freedom of Navigation, serta pesaing negara-negara menengah seperti Jepang, Australia, dan India³. Untuk menjawab tantangan geopolitik tersebut, perlu adanya mindset bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim⁴. Lebih jauh, dibutuhkannya program maritim

berkelanjutan dan berbasis kultur yang terbuka egaliter, haus pengetahuan, dan menyukai perubahan⁵.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menekankan bahwa masalah keamanan maritim bukan hanya pada isu *illegal fishing* namun lebih kepada proses hubungan internasional dan pengembangan alutsista⁶. Sedangkan menurut Staf Ahli Ketahanan Nasional Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Laksamana Muda TNI Agus Setiadji mengatakan, lemahnya pertahanan Indonesia di sektor maritim tak lepas dari menciutnya anggaran pada masa Orde Baru. Pada masa itu, alokasi anggaran untuk pertahanan hanya 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, untuk menjaga keamanan laut diperlukan anggaran lebih untuk pengadaan maupun perawatan alutsista⁷.

Sedangkan, Menteri Kelautan dan Perikanan dalam evaluasi kinerja Kementerian Juli 2016 menyampaikan penyediaan sarana dan prasarana kelautan, dan masalah mental masyarakat yang masih menggunakan cara-cara tidak

² <http://ekonomi.metrotvnews.com> diakses pada 12 Juli 2016 pukul 22.15 WIB. (pA. 318161).

³ Suropati, U. (2016). *Global Maritime Nexus: Indonesia's 21st Century Maritime Vision*. Naskah Kuliah Umum di LEMHANNAS pada tanggal 19 Mei 2016. (p.3-12)

⁴ Djalal, H. (2016). *Tantangan Indonesia Dalam Menuju Poros Maritim Dunia*. Naskah Kuliah Hukum Laut dan Perjanjian Internasional pada 26 Mei 2016. (p.1)

⁵ Limbong, B. (2015). *Poros Maritim*. Margareta Pustaka, Jakarta. (p. 230)

⁶ <http://ekonomi.metrotvnews.com> diakses pada 12 Juli 2016 pukul 22.15 WIB. (pA.160531),

⁷ news.liputan6.com, 2016, diakses pada 12 Juli 2016 pukul 20.22 WIB. (pA. 2662021)

ramah lingkungan merupakan masalah utama⁸. Isu kemiskinan di masyarakat pesisir merupakan permasalahan klasik yang harus segera diselesaikan. Dalam data TNP2K tahun 2011 jumlah masyarakat miskin di wilayah pesisir sebesar 2,13 juta rumah tangga sasaran (RTS) atau 97% dari total jumlah penduduk pesisir nasional yang mencapai 2,19 juta RTS⁹.

Berbagai isu kemaritiman yang berkaitan erat dengan aspek keamanan dan sosial kemasyarakatan merupakan bagian penting dalam integral kebijakan PMD. Bila melihat pengintegrasian keamanan dan kemasyarakatan tergambar dalam kebijakan seperti program Bina Teritorial oleh TNI AD, dan Bina desa pesisir oleh TNI AL. Namun sampai saat ini belum banyak diteliti bagaimana keterkaitan kebijakan pemerintah dalam melibatkan masyarakat ke proses keamanan di ranah sosiologis. Dengan demikian, tulisan ini berangkat dari pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana dinamika Keamanan Maritim di Pulau terdepan?
- b. Bagaimana dinamika perubahan sosial masyarakat pesisir di Pulau terdepan?
- c. Bagaimanakah rumusan strategi pelibatan masyarakat yang disusun melalui konsep perubahan sosial dan pendekatan reformasi keamanan maritim?

Metode Analisis

Makalah ini dianalisis melalui pendekatan *Mix-method* dengan menggunakan metode *Soft System Methodology (SSM)* sebagai upaya penggabungan data. Dari metode tersebut diharapkan didapat gambaran yang komprehensif. Metode *mix-method* memiliki keunggulan dapat memperluas pembahasan dengan pencampuran kedua metode sekaligus¹⁰. Sedangkan *SSM* mempermudah dalam mengambil berbagai masukkan dari pada mengidentifikasi jalan lainnya yang dirangkum dalam analisis suatu jalan pemikiran/kebijakan¹¹.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mencari keterkaitan antara faktor perubahan sosial. faktor berupa tindakan

⁸ KKP, (2016), Rencana Strategis Kementerian Kelautan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/Permen-Kp/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019. (p. 1-2)

⁹ TNP2K, (2011), Pendataan rumah tangga miskin di wilayah pesisir/nelayan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

¹⁰ Creswell, J.W. (2014). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. (p. 307)

¹¹ Williams, B & Hummelbrunner, R (2011), *Systems concepts in action: a practitioner's toolkit*. Stanford University Press, California. (p. 242).

sosial masyarakat dan perilaku pemerintah merupakan gambaran atas dinamika perubahan sosial. Selanjutnya melalui pendekatan kualitatif juga dianalisa faktor perubahan sosial lainnya seperti konflik kekuasaan, benturan ekonomi dan teknologi.

Pengumpulan data kuantitatif didapatkan berdasarkan hasil survei angket dengan menetapkan dua lokasi sebagai sampel penelitian. Lokasi penelitian adalah kepulauan Enggano dan kepulauan Mentawai yang berbatasan dengan samudera Hindia. Samudera Hindia dipilih karena kawasan tersebut masih merupakan kawasan yang memiliki ancaman keamanan maritim yang tinggi meski relatif aman. Samudera Hindia juga merupakan suatu kawasan yang saat ini berpotensi besar untuk dimanfaatkan oleh Indonesia.

Analisis kualitatif secara total digunakan untuk mempelajari fenomena Pelibatan masyarakat dalam keamanan dan dinamika keamanan maritim. Pengumpulan data kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam kepada pejabat lembaga pemerintahan. Sedangkan, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mendapat kajian yang lebih komprehensif.

Penggabungan data kuantitatif dan kualitatif merupakan tahapan awal dalam strategi SSM yaitu kajian mengamati kondisi nyata. Data perubahan masyarakat dimaksudkan merupakan hasil analisis yang mendalam untuk melihat realitas dalam dunia sebenarnya, untuk itu penggabungan data akan lebih dominan pada analisis deskriptif dengan perspektif teoritis.

Hasil dan Pembahasan

a. Upaya Pelibatan Masyarakat dalam Pertahanan dan Keamanan

Pelibatan masyarakat dalam proses keamanan diatur dalam Undang-undang negara. Dalam UUD 1945 Bab XII Pasal 30 ayat 1 dan 2, pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban setiap warga negara serta upaya pertahanan dan keamanan diatur dengan sistem rakyat semesta dengan TNI dan Kepolisian sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam UU no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dikatakan bahwa prinsip keamanan dilaksanakan berdasarkan kesemestaan, sedangkan penyelenggaraan pertahanan berdasarkan Bab III pasal 6 dilaksanakan melalui usaha membangun dan membina

kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Secara nasional proses melibatkan masyarakat dalam pertahanan dan keamanan faktanya masih menghadapi kendala fundamental. Menurut Laksma (Purn) Fanani Tedjokusumo yang merupakan purnawirawan kepala dinas pembinaan potensi maritim TNI AL bahwa,

“... Kegiatan pembinaan masyarakat sebelum era reformasi sarat akan kepentingan politis oknum yang berkaitan dengan pemilihan pemimpin. Bahkan dalam tingkat operasional proses pembinaan teritorial sering disalahgunakan oknum tentara untuk menindas dan memeras masyarakat. Salah satu program pembinaan teritorial dijalankan oleh TNI AL adalah Surya Baskara Jaya. Pasca 1998 upaya politisasi itu mulai dihindari, dan selanjutnya diupayakan kerjasama dengan berbagai lembaga baik milik negara maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan pulau-pulau terluar. Secara signifikan masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program pembangunan dan bantuan yang dijalankan. Bahkan TNI AL dijadikan sebagai ‘idola’ dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. (Fanani Tedjokusumo, Komunikasi personal, September 2016)”

Pada tingkatan operasional khususnya daerah, permasalahan pelibatan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda antara lembaga pertahanan dan lembaga keamanan. Lembaga pertahanan yang diwakili TNI AL dan TNI AD memperlihatkan persamaan doktrin mengenai upaya pelibatan masyarakat dalam pertahanan baik di Sumatera Barat maupun di Bengkulu. Namun lembaga keamanan yang diwakili Dit Polair Polda Sumatera Barat dan Bengkulu memiliki perbedaan pandangan yang masing-masing menyesuaikan dengan kebijakan Polda dan program pemerintahan daerah.

Upaya pelibatan masyarakat dalam pertahanan dan keamanan masih belum mendapatkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini karena tidak terdapatnya ancaman serius di dua lokasi penelitian. Selain itu indikator keberhasilan dalam membina masyarakat dalam pertahanan dan keamanan masih menjadi perdebatan, mengingat beberapa UU dan dokumen negara mengenai keamanan nasional, keamanan maritim, serta komponen cadangan masih dalam tahap pembahasan strategis.

b. Dinamika Keamanan Maritim

Bahasan mengenai keamanan maritim dikaitkan dengan kepentingan dan kebijakan suatu negara. Keamanan maritim sendiri sangat bergantung pada kepentingan suatu lembaga, atau berkaitan pula dengan bias politik dan ideologi¹². Keamanan maritim juga didefinisikan dengan bagaimana menciptakan ‘*good order at sea*’ atau tertatanya laut. Hal itu karena terdapat peningkatan penggunaan kekuatan laut seiring bertambahnya kerjasama ekonomi secara internasional¹³.

Keamanan maritim merupakan suatu isu yang relatif baru dalam berbagai pandangan. Kementerian pertahanan melalui Direktorat Wilayah Pertahanan mengungkapkan keamanan maritim masih dalam bentuk yang cukup umum,

“... keamanan maritim seperti halnya terminologi keamanan yang memiliki makna menciptakan suasana aman di lingkungan sehingga dapat beraktivitas tanpa ada

gangguan atau ancaman sehingga dapat berkarya tanpa rasa takut. Keamanan maritim merupakan penciptaan lingkungan laut yang aman (Dedet Hadjarati, komunikasi personal, September 2016).”

Standar keamanan sering dikaitkan dengan adanya kondisi politik dan kepentingan suatu negara, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pembinaan Potensi Maritim Markas Besar TNI AL sebagai Berikut,

“.. Sesuai dengan program yang dijalankan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga keamanan maritim tidak terlepas dari penciptaan kondisi aman di tingkat nasional dan regional untuk dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan nasional. (Isbandi Andrianto, komunikasi personal, Januari 2017).”

Pada tingkat daerah, keamanan maritim dipandang dalam kaitannya dengan ancaman. Pelbagai lembaga di lokasi sampel penelitian menanggapi isu keamanan maritim sebagai dinamika yang unik. Keterkaitan isu

¹²Rahman, C (2009). Concepts of Maritime Security A strategic perspective on alternative visions for good order and security at sea, with policy implications for New Zealand. The Centre for Strategic Studies: Victoria University of Wellington. New Zealand. (p. 29).

¹³ Till, G (2004), Seapower A Guide for the Twenty-First Century – 2nd. Routledge. New York. (p. 14).

keamanan maritim dengan politik pemerintahan pusat sangat jelas dipandang oleh lembaga daerah, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana pemikiran strategis tersebut diimplementasikan di daerah. Tugas dan tanggungjawab yang dijalankan tingkat daerah sering kali mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan daerah.

Dengan demikian, maka pemerintah daerah membutuhkan suatu strategi yang dapat menjadi panduan dalam menciptakan konsep keamanan maritim. Masalah keamanan maritim memerlukan kajian yang komprehensif setidaknya mengisyaratkan untuk terciptanya format keamanan maritim yang berbeda untuk setiap daerah. Berdasarkan UU no 23 tahun 2014 pasal 14 mengenai pembagian penyelenggaraan urusan

pemerintahan, bidang kelautan, maka terdapat landasan legal dalam mengupayakan pengelolaan kemaritiman dikelola oleh pemerintahan daerah dengan kerjasama lintas sektor terutama sektor pertahanan dan keamanan yang berada pada tingkat daerah pula.

c. Perubahan Sosial Melalui Konflik Kepentingan Maritim

Keterkaitan antara perilaku pemerintah dan tindakan sosial dalam suatu pola interaksional dapat dikaitkan dengan adanya 'konflik' yang terjadi dalam interaksi tersebut. Konflik dipandang sebagai penyebab utama dalam perubahan sosial. Konflik kelas terjadi akibat merembesnya hubungan kekuasaan ke tingkat struktur sosial dan berdampak perubahan pada nilai-nilai atau pranata. Masyarakat¹⁴.

¹⁴ Dahrendorf (dalam Lauer, 1993) Lauer, R. H. (1993). Perspektif Tentang Perubahan Sosial. PT Rineka Cipta, Jakarta. (p. 282).

Tabel 1. Tindakan Sosial Masyarakat

Tindakan Sosial	%
Tujuan	40%
Nilai	23%
Afektif	20%
Tradisional	16%

Tabel 2. Perilaku Pemerintah

Pencapaian Tujuan	%
Orientasi Internal	37%
Penggunaan Instrumental	23%
Kerjasama Lintas Sektor	20%
Orientasi Ancaman	20%

Adaptasi (Isu Tradisional)	%
Solusi Isu	61%
Evaluasi Isu	22%
Redefinisi Isu	17%
penolakan isu	0%

Integrasi	%
Lembaga lain sebagai subjek	43%
Masyarakat sebagai objek	30%
Masyarakat sebagai subjek	20%
Lembaga lain sebagai objek	7%

Pemeliharaan Pola	%
Menciptakan Inovasi	39%
Kebutuhan Inovasi	28%
Evaluasi Inovasi	22%
Menolak Inovasi	11%

Berdasarkan analisis kuantitatif didapat hubungan searah positif antara peningkatan tindakan sosial masyarakat di dua lokasi penelitian. Dari tabel 1 diketahui bahwa tindakan sosial yang paling dominan adalah tindakan rasionalitas tujuan yang mencapai angka 40%, sedangkan pada tabel 2 diketahui perilaku pemerintah yang paling dominan yakni perilaku pencapaian tujuan melalui orientasi internal kelembagaan, adaptasi isu tradisional dengan pemberian solusi isu, dan pola integrasi memandang lembaga lain sebagai objek.

Secara garis besar dapat digambarkan bahwa semakin besar keinginan pemerintah untuk menciptakan solusi suatu isu, berorientasi pada ancaman, dan orientasi tujuan kerjasama dan penggunaan instrumental maka akan semakin rendah tingkat tindakan sosial masyarakat berorientasi tujuan, namun sebaliknya akan memungkinkan memunculkan keinginan masyarakat untuk bertindak berdasarkan nilai dan dalam pola pemikiran yang berbasis keinginan di bawah alam sadar

Bila antar lembaga pertahanan, keamanan, dan pemerintahan daerah dianggap sebagai suatu struktur kekuasaan dan menjalankan proses

konflik semu maka konflik dapat dipandang sebagai berikut:

Konflik Antar Kekuasaan

Secara makro masyarakat Indonesia mengalami perubahan tindakan sosial yang cukup signifikan setelah era reformasi. Munculnya semangat sebagian masyarakat untuk membuang yang “serba lama” dan menggantikan dengan yang “serba baru.”. Bahkan lebih jauh ditinjau dari sisi ekonomi dan politik, menciptakan kegaduhan, konflik, dan benturan sosial disertai aksi-aksi kekerasan yang terjadi di mana-mana¹⁵.

Sebagai dampak pasca reformasi 1998 tercipta otonomi daerah dan penghapusan dwi fungsi ABRI. Kehadiran awal otonomi daerah sendiri dipandang sebagai suatu upaya untuk menjamin keunikan bangsa Indonesia dengan keberagaman etnik seperti pada UU No 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” dan UU No 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. Kemunculan UU tersebut menyangkut upaya perubahan format politik keseragaman budaya Indonesia yang dituangkan pada era orde

baru menuju keberagaman¹⁶. Isu lain yang dihadapi adalah penghapusan dwifungsi ABRI sebagai upaya pembatasan tanggungjawab militer dan sipil. Pembatasan tersebut memacu terbentuknya *gap* antara TNI dan Polri, yang memunculkan konflik lain dalam upaya perebutan kekuasaan antar elit pemerintahan.

Dampak pembagian kekuasaan tersebut jelas terlihat di dua lokasi penelitian yaitu pemerintahan Sumatera Barat dan Bengkulu. Di kedua lokasi tersebut terlihat bahwa yang menjadi akselerator utama dalam perubahan adalah pemerintahan daerah sedangkan pemerintahan pusat merupakan pengatur ritme perubahan sebagaimana kebijakan nasional tercipta dan menjadi panduan daerah. Ketika pemerintahan daerah menjalankan pemerintahannya berdasarkan standar nasional yang berlaku maka perembesan kekuasaan nasional akan memiliki dampak yang signifikan dan berpengaruh pada perubahan di daerah.

¹⁵ Yudhoyono, S. B. (2014). *Selalu Ada Pilihan untuk Pencinta Demokrasi dan Para Pemimpin Indonesia Mendatang*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta. (p. 17)

¹⁶ Tirtosudarmo, R (2007), *Mencari Indonesia Demografi-Politik Pasca-Soeharto*. LIPI Press Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesi, Jakarta. (p. 16)

Konflik Kekuasaan Melibatkan Masyarakat

Secara teoritis masyarakat dipandang sebagai unit lain dalam struktur sosial yang memiliki pengaruh dan terkena dampak dalam perubahan sosial. Dalam kasus konflik industri yang terkena dampak utama dalam konflik kekuasaan adalah buruh sebagai organisasi majikan. Konflik antar majikan ini menyebabkan pula konflik pada organisasi buruh akibat adanya pengelompokan semu yang dilakukan oleh majikan¹⁷.

Teoritis masyarakat Pulau Enggano dan Siberut yang berada pada Samudera Hindia mempunyai kesulitan akses menuju pembaharuan. Masyarakat di kedua pulau ini sering kali disebutkan sebagai masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dengan ciri khas etnik. terkandung dalam kearifan lokal.

Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu merupakan suatu daerah yang masih menyimpan banyak nilai-nilai adat yang kental. *Taabot* masih diselenggarakan tahunan oleh pemerintah provinsi Bengkulu. Kebudayaan Minang yang masih kental dengan orientasi tiga pemimpin kekuasaan antara adat, pemerintah, dan agama (filosofi *adak basanding sarak*,

sarak basanding kitabullah). Bila masyarakat Pulau Siberut dan Enggano mengalami difusi budaya dengan masyarakat Sumatera Barat dan Bengkulu maka masih akan terdapat semangat kental dalam menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam masyarakat.

Di Pulau Siberut, dalam proses interaksional kekuasaan tidak terdapat konflik yang cukup kuat dalam upaya penciptaan inovasi sehingga perubahan fundamental tidak berjalan dengan baik di kawasan tersebut. Konflik horizontal tidak terjadi secara signifikan baik frontal maupun semu dan tidak ada keberpihakan pemerintah atau struktur sosial lainnya yang cukup kuat mempengaruhi pengorganisasian masa.

Munculnya perubahan pola tindakan sosial sebagai upaya perubahan sosial dari sisi distorsi kekuasaan akibat dampak konflik belum dapat menjadi jawaban yang signifikan. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi seperti halnya benturan ekonomi dan teknologi yang menjadi akselerasi lain dalam perubahan sosial.

Benturan Ekonomi

Perubahan dapat terjadi pula tanpa adanya konflik frontal. Dalam pidato Engels dikatakan bahwa aktivitas

¹⁷ Lauer, R. H. (1993). *Perspektif.....* (p. 282)

ekonomi sangat penting di mana manusia pertama kali harus makan, minum, mempunyai tempat tinggal dan pakaian, sebelum berpolitik, ilmu pengetahuan, seni, agama dan sebagainya¹⁸.

Konflik mulai terjadi ketika pendatang dengan motif ekonomi dan pembuangan persaingan urban datang ke wilayah yang terisolir tersebut. Program pemerintah yang paling berpengaruh adalah program transmigrasi. Konflik semu antara pendatang dan masyarakat lokal justru menyebabkan akulturasi nilai-nilai baru dalam masyarakat di pulau Enggano. Pada tingkat ini masyarakat mulai menyadari pentingnya penguatan ekonomi dan pendidikan sebagai bentuk awal dasar dari masyarakat post-modernis. Selanjutnya masyarakat Pulau Enggano berinteraksi lebih jauh dengan masyarakat di luar dalam upaya pendidikan dan aktivitas ekonomi yang menciptakan generasi transisi antara masyarakat dengan nilai-nilai lokal dan masyarakat post-modernis.

Di Pulau Siberut tidak dijalankan transmigrasi, sehingga dampak kekuasaan nasional tidak besar. Kedatangan pendatang di Pulau Siberut

terjadi pula, namun konflik yang kental menyebabkan keterpisahan antara masyarakat asli dan pendatang. Masyarakat pendatang menempati posisi di kawasan pesisir, sedangkan masyarakat asli memilih tinggal terisolir di hutan dan dataran-dataran tinggi pulau. Masyarakat pendatang mengalami perubahan ekonomi yang cukup signifikan dengan adanya potensi alam Pulau Siberut. Pendapatan utama masyarakat pendatang terdapat pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta jasa pariwisata. Keterpisahan masyarakat lokal dan pendatang baru dapat dihubungkan dengan adanya pengenalan pendidikan dan agama sebagai pemersatu. Perkembangan pariwisata yang berjalan cepat menghadirkan masyarakat global ke Pulau Siberut yang selanjutnya masyarakat global tersebut lebih memihak pada warga lokal sehingga perubahan sosial pada masyarakat lokal banyak dipengaruhi pada instrumen nilai berbasis ide dibandingkan materil.

Benturan Teknologi

Secara teoritis perubahan sosial juga dapat terjadi akibat perkembangan teknologi dalam 3 cara. Mesthene (1968) menyatakan bahwa teknologi dapat meningkatkan alternatif-alternatif

¹⁸ Jones, P. (2009). Pengantar Teori-Teori Sosial dari Fungsionalisme hingga Post-modernisme, Yayasan pustaka obor Jakarta, Jakarta. (p. 77)

peluang, dengan kata lain teknologi membawa cita-cita yang sebelumnya tak dapat dicapai ke dalam alam kemungkinan dan dapat mengubah kesukaran relatif atau memudahkan menyadari nilai-nilai yang berbeda¹⁹. Cara lainnya adalah ketika teknologi mempengaruhi perubahan dengan mengubah pola-pola interaksi²⁰. Cara terakhir adalah melalui munculnya masalah sosial baru sebagai dampak terduga maupun tak terduga dari penerimaan inovasi teknologi²¹.

Perkembangan teknologi alat tangkap di Pulau Siberut tidak begitu berbeda dengan alat tangkap di Pulau Enggano. Dari segi ukuran dan kapasitas tangkapan, nelayan Pulau Siberut lebih unggul dibandingkan dengan Pulau Enggano. Untuk mengupayakan alat tangkap dan kapalnya, nelayan Pulau Siberut memanfaatkan sumberdaya di sekitarnya. Penggunaan jaring lingkaran dan pancing rawai masih menjadi pilihan utama didukung beberapa toko yang menyediakannya.

Teknologi yang dikonsumsi oleh masyarakat, juga didominasi oleh kendaraan bermotor dan komunikasi.

Kemunculan teknologi justru mengantarkan kepada masalah sosial baru, di mana kebutuhan akan energi (listrik dan BBM) mengalami peningkatan serius, dan masyarakat mengalami ketergantungan total.

Dampaknya adalah peningkatan kebutuhan dan perlunya tambahan pendapatan. Ini pada dasarnya mengakselerasi masyarakat untuk berinovasi dan menciptakan kreatifitas. Namun keterbatasan ide menyebabkan masyarakat memikirkan jalan lain. Maka proses-proses ilegal dan curang sangat rentan terjadi, sebagai contoh meningkatnya upaya penangkapan ikan tak ramah lingkungan (penggunaan bom, racun, dan pukat harimau), dan penyelundupan minyak, barang, dan narkoba. Seperti yang dijelaskan oleh Polair Polda Sumbar dengan angka kejadian Illegal fishing antara tahun 2011-2015 mencapai angka 31 kasus (Mulyadi, Komunikasi personal, November 2016).

d. Strategi Kebijakan Keamanan Maritim Berbasis Perubahan Sosial

Siklus perubahan sosial dapat dijadikan bahan untuk analisis lebih lanjut dalam kaitan untuk pengambilan keputusan. Perubahan sosial dianggap sebagai faktor internal dalam formulasi. Untuk

¹⁹ Lauer, R. H. (1993). *Perspektif...*, (p. 220)

²⁰ Lauer, R. H. (1993). *Perspektif...*, (p. 221)

²¹ Lauer, R. H. (1993). *Perspektif...*, (p. 223-224)

mencapai model ideal kebijakan kemaritiman dengan melibatkan masyarakat dalam keamanan maritim melalui pendekatan SSM, setidaknya dapat disusun poin-poin kebijakan sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan berbasis Maritim. Kebijakan ini merupakan kunci awal dalam proses penetapan model keamanan maritim. Sebagaimana kebijakan ini merupakan inti dari kebijakan *maritime security sector reform*, dan belum menjadi pemikiran mendasar dalam program Poros Maritim Dunia, namun kebijakan ini dapat dijalankan melalui program revolusi mental yang khusus dijalankan pada tingkatan birokrasi pemerintahan. Seperti halnya yang dijalankan oleh pemerintah provinsi Bengkulu dengan mengharapkan reformasi birokrasi dapat dijadikan alat untuk penyebarluasan proses perubahan sosial dari elitis pemerintah ke masyarakat.
2. Fokus pengembangan ekonomi maritim. Proses pengembangan ekonomi maritim selain melihat kondisi geografis dan potensi sumberdaya alam, juga merupakan kewajiban yang tertuang dalam

aturan hukum laut internasional di mana negara dengan sumberdaya laut yang tinggi namun tidak dapat mengelolanya harus memberikan kesempatan kepada negara lain untuk ikut andil dalam mengeksploitasi sumberdaya lautnya. Bila kebijakan ini tidak dijalankan dengan fokus akan memiliki dampak besar di kemudian hari.

3. Pertahanan dan keamanan maritim melalui otoritas sipil, Undang-undang dasar telah banyak memberikan petunjuk untuk dapat melibatkan masyarakat dalam suatu upaya menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara. Program 'belanegara' yang telah dijalankan oleh kementerian pertahanan harus dapat dikembangkan secara lebih masif dan terukur sebagaimana bentuk ancaman yang tak dapat diprediksi.
4. Pengembangan budaya maritim melalui diplomasi. Era globalisasi yang mengaburkan batasan antar negara, bukan menjadi hambatan untuk proses penanaman budaya maritim di lingkup nasional. Mengenalkan budaya maritim secara internasional diharapkan

menjadi pola label yang diakui dunia internasional dan tercermin ke masyarakat nasional yang telah memiliki komunitas maya internasional sendiri. Peran teknologi informasi harus dapat dimanfaatkan oleh lembaga negara secara maksimal. Menciptakan sarana dan prasarananya merupakan alat utama propaganda dan penggalangan dalam proses kontrol krisis identitas nasional.

Kesimpulan

Pelibatan masyarakat dalam keamanan selama ini mengalami kesulitan dalam mendefinisikan strategi. Kegiatan pelibatan masyarakat yang diselegarakan oleh lembaga pertahanan (TNI) mengikuti format nasional namun tidak adaptif untuk karakteristik daerah yang memiliki keberagaman. Lembaga keamanan (POLRI) menjalankan kebijakan pelibatan keamanan sesuai dengan kebijakan politik daerah namun tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya secara nasional.

Dinamika keamanan maritim di dua lokasi penelitian sangat berbeda tergantung pada faktor ancaman. Untuk lembaga yang mengikuti standar nasional sering kali terjadi pertentangan kebijakan dan kearifan lokal daerah. Diperlukan

kebijakan keamanan maritim yang sesuai dengan format ancaman daerah yang dirumuskan secara bersama-sama oleh unsur pimpinan musyawarah daerah. Peran nasional berada pada penunjukkan aktor dan leading sector dalam kebijakan keamanan maritim yang dapat diadopsi pemerintah daerah.

Tindakan masyarakat pesisir Pulau Enggano dan Siberut bukanlah tindakan yang ideal untuk masyarakat yang berada pada kondisi tertinggal dan terpencil, hal tersebut mengisyaratkan bahwa semangat perubahan telah sampai kepada titik terkecil masyarakat Indonesia. Gambaran tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menjadi pengaruh paling dominan dalam proses perubahan sosial di masyarakat Indonesia pasca promosi otonomi daerah.

Perembesan konflik kekuasaan lokal terjadi penuh di Pulau Enggano, sedangkan di Pulau Siberut hanya menonton konflik nasional dikarenakan pemerintahannya yang relatif konservatif menjaga nilai-nilai adat. Namun demikian, kebutuhan ekonomi dan benturan teknologi sebagai faktor lain dalam perubahan mempengaruhi pergerakan masyarakat di kedua pulau. Dari hasil perubahan tindakan sosial masyarakat dapat diketahui bahwa perubahan lebih

cenderung kecil di Pulau Siberut dibandingkan Pulau Enggano.

Melalui gambaran perubahan sosial di kedua lokasi penelitian dapat disusun pendekatan model keamanan maritim yang paling ideal sebagai berikut: (1) Tata kelola pemerintahan berbasis maritim; (2) Fokus pengembangan ekonomi maritim; (3) Pertahanan dan keamanan melalui otoritas Sipil; (4) Pengembangan budaya maritim melalui diplomasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Creswell, J.W. (2014). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Jones, P. (2009). *Pengantar teori-teori sosial dari fungsionalisme hingga post-moderinisme*, Yayasan pustaka obor Jakarta, Jakarta.
- Lauer, R. H. (1993). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Limbong, B. (2015). *Poros Maritim*. Margareta Pustaka, Jakarta.
- Rahman, C (2009). *Concepts of Maritime Security A strategic perspective on alternative visions for good order and security at sea, with policy implications for New Zealand*. The Centre for Strategic Studies: Victoria University of Wellington. New Zealand.
- Till, G (2004), *Seapower A Guide for the Twenty-First Century – 2nd*. Routledge. New York.
- Tirtosudarmo, R (2007), *Mencari Indonesia Demografi-Politik Pasca-Soeharto*.

LIPI Press Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesi, Jakarta.

Williams, B & Hummelbrunner, R (2011), *Systems concepts in action: a practitioner's toolkit*. Stanford University Press, California

Yudhoyono, S. B. (2014). *Selalu Ada Pilihan untuk Pencinta Demokrasi dan Para pemimpin Indonesia Mendatang*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Makalah Seminar, Konferensi, dan Sejenisnya

Djalal, H. (2016). *Tantangan Indonesia Dalam Menuju Poros Maritim Dunia. Naskah Kuliah Hukum Laut dan Perjanjian Internasional pada 26 Mei 2016*.

Suropati, Untung (2016). *Global Maritime Nexus: Indonesia's 21st Century Maritime Vision*. Naskah Kuliah Umum di LEMHANNAS pada tanggal 19 Mei 2016.

Dokumen Lembaga

TNP2K, (2011), *Pendataan rumah tangga miskin di wilayah pesisir/nelayan*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

KKP, (2016), *Rencana Strategis Kementerian Kelautan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/Permen-Kp/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara.

Internet

<http://bbc.com>, 2016, (pA.160531), diakses
pada 19 Januari 2016 pukul 03.40
WIB.

<http://ekonomi.metrotvnews.com>
(pA.160531), diakses pada 12 Juli 2016
pukul 22.15 WIB.

<http://news.liputan6.com>, 2016, (pA.
2662021), diakses pada 12 Juli 2016
pukul 20.22 WIB.